

**SKRIPSI**

**ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN REL KERETA API TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEC. BONTOA KAB. MAROS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



**OLEH :**

**ANDI KHUSNUL KHATIMAH**

**E041191007**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN REL KERETA API TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEC. BONTOA KAB. MAROS

Yang Diajukan Oleh :

**ANDI KHUSNUL KHATIMAH**

**E041191007**

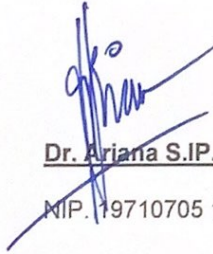
Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Ariana S.IP., M.Si.

NIP. 19710705 199803 2 002

  
Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP

NIP. 19920502 201904 4 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

NIP. 19621231 199003 1 02

**HALAMAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN REL KERETA API TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEC. BONTOA KAB. MAROS**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**ANDI KHUSNUL KHATIMAH**

**E041191007**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Dr. Ariana S.IP., M.Si.

(.....)

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.

(.....)

Anggota : Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

(.....)

Anggota : Haryanto, S.IP., M.A.

(.....)



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Khusnul Khatimah

Nim : E041191007

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Dampak Pembangunan Rel Kereta Api Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Bontoa Kab. Maros" adalah merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Agustus 2023



**ANDI KHUSNUL KHATIMAH**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Dampak Pembangunan Rel Kereta Api Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Bontoa Kab. Maros”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

Skripsi ini penulis persembahkan pertama-tama kepada orang yang berjasa selama penulis hidup yaitu Bapak Dedi Sukri & Ibu Andi Irma Sari selaku kedua orang tua penulis, serta Kakek dan Nenek, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan untuk penulis selama ini hingga mencapai titik ini. Semoga selalu sehat, bahagia dan semua berkah yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Juga kepada adik-adik penulis Andi Tsabita Dzalsabila dan Andi Fahri Ashari, terima kasih atas semua dukungan, motivasi, dan perhatiannya. Semoga selalu diberikan kebahagiaan serta kesuksesan dalam kehidupan.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghanturkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, **Prof Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.**, yang memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Prof. Dr. Phill Sukri, S.IP., M.Si.**, sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.**, beserta segenap jajaran staff akademik.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak **Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si.**, beserta segenap jajaran staff.

5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.** beserta segenap jajaran staff.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak **Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.**, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. **Seluruh dosen-dosen Departemen Ilmu Politik** : Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis di masa depan.
8. Terimakasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing I Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.Si.** yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan.

9. Terimakasih tak terhingga juga kepada Dosen Pembimbing II Ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.** yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran dan saran yang diberikan selama penyusunan skripsi ini, semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan.
10. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak **Syamsuddin, S.T.**, dan Ibu **Musriati S.E.**, yang telah membantu dan memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Departemen Ilmu Politik.
11. Staf Administrasi FISIP Unhas, Bapak **Sutamin**, Bapak **Herman** dan Staf lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah membantu dan memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi.
12. Kepada seluruh narasumber/informan Bapak **Mulyadi S.STP** (Camat Kecamatan Bontoa) Bapak **Baso, S.E., M.Si.** (Sekertaris Kecamatan Bontoa) Bapak **Muhammad Warif. S.Pd.I., M.Pd.I.** (Kepala Desa Botolempangan) Bapak **H. Haris**, Bapak **H. Arifin**, Bapak **Laumma**, Bapak **H. Kaning**, Bapak **H. Ilyas** (Selaku Masyarakat).
13. Seluruh **teman-teman Ilmu Politik Angkatan 2019 dan DIPLOMASI 2019.** Teman-teman yang telah berbagi suka dan duka selama 4 tahun terakhir, terima kasih atas banyak pengalaman dan cerita berharga yang telah kita lalui bersama-sama, sampai ketemu di masa yang akan datang, semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan masing-masing.



14. Seluruh **keluarga besar HIMAPOL FISIP UNHAS** untuk kakak-kakak Angkatan 2015, 2016, 2017, dan 2018, serta teman-teman Angkatan 2020 dan 2021, yang telah menjadi tempat berproses dan berorganisasi selama masa perkuliahan penulis.
15. **Teman-teman KKN Gel. 108 Desa Wisata Maros Posko Desa Botolempangan** yang telah memberi pengalaman berharga selama dua bulan tinggal bersama. Terima kasih atas kenangan indah nya di Desa Botolempangan.
16. Untuk sahabat *ft* (**Alifah Salsabila, Khusnulnisa Firda, Andi Astriyuliani, Anilda Adeswita, Nur Rafida, Andi Nurfairuz Eka Putri, Amalia Putri**) telah menemani penulis selama 10 tahun pertemanan sedari SMP hingga saat ini. Masa dan cerita di smp akan selalu menjadi kisah yang tidak akan penulis lupakan, semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan masing-masing.
17. Untuk sahabat *bikinibottom* (**Tarisa Rahmadani, Srinovia Nurul Qalbi, Nabilah Palungan, Ria Magfirah**). Terimakasih karena telah menjadi tempat bertukar cerita, pendengar yang baik dan penghibur penulis selama menjalani proses penulisan skripsi ini dan terima kasih juga karena telah menjadi sosok yang paling penting selama perjalanan masa perkuliahan penulis serta memberikan banyak kenangan indah dan selalu menjadi sumber keceriaan disetiap langkah penulis dalam mendapatkan gelar sarjana. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan.

18. **Terakhir**, terima kasih kepada diri saya sendiri karena tidak menyerah dan tetap berjuang dalam keadaan apapun. Terima kasih juga karena sudah berusaha, sabar dan bertahan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki kelalaian dan keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini

Makassar, 5 Agustus 2023

**Andi Khusnul Khatimah**

## ABSTRAK

**Andi Khusnul Khatimah. NIM E041191007. Analisis Dampak Pembangunan Rel Kereta Api Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Bontoa Kab. Maros. Di bawah bimbingan Ariana sebagai pembimbing utama dan Ummi Suci Fathia Bailusy sebagai pembimbing pendamping.**

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya pembangunan rel kereta api yang merupakan salah satu proyek prioritas strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan berada pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. Peraturan ini berada pada Proyek Prioritas Strategis No. 21 Terkait Kereta Api Makassar-Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pembangunan kereta api tersebut dengan menggunakan analisis kebijakan retrospektif. Dengan analisis yang memfokuskan pada penelitian setelah aksi kebijakan dilaksanakan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan melihat bahwa peneliti telah mendapatkan informasi yang dilakukan secara langsung dengan mewawancarai informan terkait. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan teori analisis kebijakan retrospektif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan pembangunan ini cukup terlaksana dengan baik bagi masyarakat sekitar yang tidak terdampak pembebasan lahan. Namun, bagi masyarakat yang terdampak pembebasan lahan dan harus merelakan lahannya berpendapat yang sebaliknya atau merasa dirugikan dengan adanya pembangunan ini.

**Kata Kunci: Analisis Kebijakan Retrospektif, Dampak Pembangunan**

## **ABSTRACT**

**Andi Khusnul Khatimah. NIM E041191007. Analysis of the Impact of Railway Development on Community Welfare in Bontoa District, Maros Regency. Under the guidance of Ariana as the main supervisor and Ummi Fathia Bailusy as a co-advisor.**

This research is motivated by the construction of a railroad which is one of the strategic priority projects of the 2020-2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN) and is contained in Presidential Regulation no. 18 of 2020. This regulation is in Strategic Priority Project No. 21 Regarding the Makassar-Parepare Railway. This study aims to examine the impact of the railroad development using retrospective policy analysis. With an analysis that focuses on research after the policy action is implemented.

The type of research used is qualitative research. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews, observation, and documentation. This is done by seeing that the researcher has obtained the information which is done directly by interviewing the relevant informants. The data obtained were then analyzed using retrospective policy analysis theory.

The results of this study indicate that with this development policy implemented quite well for the surrounding community who are not affected by land acquisition. However, the people affected by land acquisition and who have to give up their land have the opposite opinion or feel disadvantaged by this development.

**Keywords: Retrospective Policy Analysis, Development Impact**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Konsep Tentang Kebijakan.....	9
2.1.1 Analisis Kebijakan .....	10
2.1.2 Analisis Kebijakan Retrospektif .....	11
2.1.3 Evaluasi Kebijakan (William N. Dunn) .....	13

2.2	Konsep Tentang Pembangunan .....	16
2.3	Kerangka Pikir .....	17
2.4	Skema Pemikiran.....	18
2.5	Penelitian Terdahulu .....	19
<b>BAB III.....</b>		<b>24</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>		<b>24</b>
3.1.	Jenis Penelitian.....	24
3.2.	Lokasi Penelitian.....	25
3.3.	Informan Penelitian .....	26
3.4.	Instrumen Penelitian .....	28
3.5.	Jenis dan Sumber Data .....	28
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	31
<b>BAB IV .....</b>		<b>33</b>
<b>GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>		<b>33</b>
4.1	Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Kabupaten Maros .....	33
4.1.1.	Kondisi Geografis Kabupaten Maros .....	33
4.1.2.	Visi dan Misi Kabupaten Maros .....	35
4.1.3.	Penduduk Kabupaten Maros .....	36
4.2	Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Kecamatan Bontoa .....	36
4.2.1	Kondisi Geografis Kecamatan Bontoa .....	36
4.2.2	Penduduk Kecamatan Bontoa .....	38
4.2.3	Lahan dan Penggunaannya .....	38
4.3	Jalur Rel Kereta Api.....	39



<b>BAB V .....</b>	<b>41</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
5.1    Analisis Retrospektif Kebijakan Pembangunan Rel Kereta Api ...	42
5.1.1    Aksi Kebijakan.....	43
5.1.2    Hasil Kebijakan .....	48
5.1.3    Kinerja Kebijakan .....	52
5.2    Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pembangunan Rel Kereta Api ..	58
5.2.1    Dampak Positif .....	58
5.2.2    Dampak Negatif .....	60
<b>BAB VI .....</b>	<b>63</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
6.1    Kesimpulan.....	63
6.2    Saran.....	65
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Skema Pemikiran.....	19
<b>Gambar 4.1</b> Peta Maros.....	34
<b>Gambar 5.1</b> Bagan Analisis Kebijakan William N. Dunn.....	43

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Luas Daerah.....	38
<b>Tabel 4.2</b> Batas Wilayah.....	38
<b>Tabel 4.3</b> Jumlah Penduduk.....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Dokumentasi 1.</b> Mulyadi S.STP. & Baso S.E., M.Si.....	71
<b>Dokumentasi 2.</b> Muhammad Warif. S.Pd.I., M.Pd.I.....	71
<b>Dokumentasi 3.</b> H. Haris.....	72
<b>Dokumentasi 4.</b> H. Arifin.....	72
<b>Dokumentasi 5.</b> H. Kaning & Laumma.....	73
<b>Dokumentasi 6.</b> H. Ilyas.....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan angkutan massal kereta api yang beroperasi di Sulawesi Selatan sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan ekonomi di masa depan.

Proyek Kereta Api Makassar-Parepare sepanjang 144 km merupakan bagian dari jaringan kereta api Trans Sulawesi yang akan menghubungkan seluruh Pulau Sulawesi. Skema pendanaan pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berasal dari APBN dan proyek ini ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan.

Pembangunan rel kereta api tersebut merupakan salah satu proyek prioritas strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berada pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. Peraturan ini berada pada Proyek Prioritas Strategis No. 21 Terkait Kereta Api Makassar-Parepare dan ditargetkan rampung pada 2024. Tujuan peraturan ini dibuat agar bisa menghubungkan Kawasan Industri dengan Pelabuhan Garongkong dan Makassar *New Port* melalui Jalur Kereta Api, serta mengurangi beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi dan juga sebagai jangka panjang jaringan KA

Makassar-Parepare bagian dari jaringan KA Kawasan Metropolitan Makassar.

Pembangunan ini merupakan sarana perkeretaapian Sulawesi Selatan dimana dapat berperan sebagai sarana transportasi yang mampu mendukung permintaan angkutan penumpang dan perpindahan barang. Jalur kereta api akan menghubungkan pelabuhan di Parepare dan di Makassar.

Selain sebagai angkutan penumpang, kereta itu juga akan difungsikan sebagai kereta wisata menuju sejumlah objek wisata di Sulawesi Selatan yang potensial. Kereta Api ini juga dibutuhkan di Sulawesi Selatan untuk mengangkut komoditas seperti Batubara, Semen, dan lainnya. Dengan kolaborasi Kereta Api penumpang dan barang ini diharapkan jalur tersebut akan produktif dan mampu menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di daerah Sulawesi Selatan.

Meski masuk proyek strategi nasional (PSN) proyek rel kereta api Makassar-Parepare ini juga memiliki beberapa hambatan dalam prosesnya, salah satunya ialah kendala pembebasan lahan yang membuat pembangunan ini belum rampung. Salah satu penghambat selama proses pembangunan ini ialah masalah ganti rugi dikarenakan adanya beberapa penolakan dari sejumlah warga yang belum mau memberikan tanahnya kepada pemerintah. Terkait pembebasan lahan khususnya di Kecamatan Bontoa terdapat konflik antar warga dan pemerintah. Belasan petani di Desa Salenrang menolak lahan pertanian produktif mereka terkena proyek



pembangunan rel kereta api. Mereka khawatir, dengan uang ganti rugi tak bisa mendapatkan lahan baru untuk bertani. Di Desa Salenrang terdapat 13 bidang tanah masuk dalam perencanaan pembangunan rel kereta api. Petani sekitar berkata bahwa mereka tak tahu berbisnis dan bukan pengusaha, lalu tiba-tiba proyek rel kereta api ingin menukar tanah para petani tersebut. Maka ada baiknya mengganti lahan tersebut dengan pengganti yang setara sehingga tidak menimbulkan dampak buruk yang merugikan.

Ketika jalur kereta api dibangun, akan muncul dampak lingkungan dan sosial untuk wilayah di kiri dan kanannya. Baik dampak di bidang infrastruktur, transportasi maupun lingkungan. Banyak daerah persawahan yang terkena penggusuran akibat proyek ini sehingga lumbung pangan berkurang. Maka kerusakan lingkungan bisa semakin memburuk karena dampak tidak langsung dari proyek rel kereta ini dikarenakan lahan perkebunan dan sawah berkurang. Adapun dampak lingkungan lainnya dari proyek ini yaitu polusi udara yang timbul dari aktivitas pembangunan ini serta kerusakan jalanan akibat truk yang berlalu-lalang di sekitar pemukiman warga. Kerusakan jalanan inipun menyebabkan sulitnya akses masuk ke Desa dan seringnya terjadi kecelakaan oleh warga yang ingin melalui jalan tersebut diakibatkan oleh kerusakan jalanan.

Tetapi adapun dampak lain dari pembangunan ini yaitu bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya. Namun juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga bisa menjadi salah satu

tekanan bagi infrastruktur. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang bersifat positif bisa mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat akan berbagai macam infrastruktur. Peran infrastruktur disini yaitu sebagai penggerak di sektor perekonomian dan bisa menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier. Pada akhirnya, hal itu akan menciptakan lapangan bisnis yang baru dan memberikan output yang berasal dari hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.

Pembangunan infrastruktur disini merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya proses pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan ini membuat pemerintah berupaya untuk menyediakan kerangka kerja yang baik dalam penyelenggaraan proyek infrastruktur.

Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehidupan sehari-hari manusia memang tidak bisa lepas dari perubahan sekalipun pada masyarakat yang primitif. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang mengalami perubahan baik disadari oleh masing-masing individu ataupun yang tidak disadari.<sup>1</sup>

Pembangunan merupakan suatu proses untuk memperbaiki produktivitas dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dua kata yang

---

<sup>1</sup> Amal Taufiq dkk, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: CV. MitraMedia Nusantara, 2013, hal. 175-176.

tidak pernah lepas didalam memahami pembangunan yaitu pertumbuhan dan perubahan. Secara nasional pembangunan selalu dilihat dari kemampuan Negara untuk mencapai angka pertumbuhan tertentu. Apakah angka pertumbuhan yang telah ditetapkan telah mampu merubah kesejahteraan.<sup>2</sup> Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki seperti pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi yang sementara dibangun adalah bagian dari perubahan sosial.

Dampak pembangunan jalur rel kereta api yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari adanya pembangunan tersebut. Adanya pembangunan yang masuk dan berkembang di masyarakat pada hakikatnya diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti pembangunan jalur rel kereta api Trans Sulawesi yang dibangun agar menjangkau daerah-daerah penting di Pulau Sulawesi dan menghubungkan wilayah atau perkotaan yang mempunyai potensi angkutan penumpang dan barang atau komoditas berskala besar. Namun, yang sering terjadi adalah sebagian masyarakat ada yang cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut dan ada juga sebagian masyarakat yang sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut yang kemudian berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dr. Ir. Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, M.Si dkk, Pembangunan Perdesaan dan Kemitraan Agribisnis (Suatu Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesejahteraan), Kalimantan Timur : LPPM Unikarta Press, hal. 1

<sup>3</sup> Nurfadillah, Skripsi : Dampak Pembangunan Rel Kereta Api Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat di Kelurahan Mangempang Kec. Barru Kab. Barru, (Makassar : UIN Alauddin, 2016), Hal. 8.

Masyarakat di Maros kec. Bontoa menggunakan berbagai macam jenis transportasi seperti mobil, motor, bentor, dan sepeda. Transportasi ini digunakan dikesehariannya untuk meringankan perjalanan mereka baik yang jarak jauh maupun yang jarak dekat. Seiring dengan perkembangannya modernisasi pemerintah Kabupaten Maros menyetujui pembangunan jalur kereta api lintas Makassar-Parepare. Jalur kereta api Makassar-Parepare adalah jalur sepanjang kurang lebih 145 kilometer ini merupakan tahap pertama dari pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dari Kota Makassar menuju Kota Parepare.

Melihat fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan seberapa besar pengaruh dan dampak dari proyek rel kereta api terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dengan latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Pembangunan Rel Kereta Api Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Bontoa Kab. Maros”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan :

1. Bagaimana analisis retrospektif kebijakan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari pembangunan rel kereta api ini dan bagaimana dampak positif dan negatif dari pembangunan rel kereta api terhadap masyarakat di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis secara retrospektif adanya kebijakan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.
2. Mengetahui bagaimana dampak positif dan negatif dari pembangunan rel kereta api terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmiah serta pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan bidang kajian ilmu sosial politik, khususnya di ranah disiplin ilmu politik yang berkaitan dengan kebijakan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu :

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa fakta-fakta temuan di lapangan dalam meningkatkan daya kritis dan analisis peneliti sehingga memperoleh pengetahuan tambahan dari penelitian tersebut dan khususnya penelitian ini dapat menjadi referensi penunjang yang diharapkan dapat berguna bagi peneliti berikutnya.

#### **b. Bagi Civitas Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat digunakan sebagai masukan, pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi mengenai kondisi sosial politik dan permasalahan yang ada di dalamnya serta bisa menjadi bahan acuan pada penelitian sejenis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Tentang Kebijakan

Kebijakan merupakan tindakan pemerintah, baik dalam artian sempit maupun dalam artian luas. Oleh karena itu ia merupakan "*public policy*" (kebijakan pemerintah, kebijakan umum, kebijakan negara). Dalam hal ini diartikan kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak, yang maknanya bisa berupa "suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, maupun suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana".<sup>4</sup> Kebijakan juga disini ialah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.<sup>5</sup>

Konsep kebijakan Friedrich mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah yang ditujukan untuk memecahkan masalah. Menurut Friedrich, Sharkansky (1970) mendefinisikan politik sebagai tindakan pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta. 2016. Hal 16.

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008. Halaman 20.

<sup>6</sup> William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Bahasa Indonesia)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1999.

### 2.1.1 Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan.<sup>7</sup> Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti tentang sebab, akibat dan kinerja kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan. Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum; yaitu pengungkapan pendapat. Kegiatan-kegiatan yang tercangkup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan terhadap isu-isu atau masalah.<sup>8</sup>

Konsepsi analisis kebijakan menekankan pada sifat praktis analisis kebijakan seperti tanggapan terhadap masalah-masalah yang muncul dan krisis yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Analisis kebijakan juga meliputi evaluasi kebijakan dan rekomendasi kebijakan.<sup>9</sup>

Pertama fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas. Kedua, sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka

---

<sup>7</sup> Harold D. Lasswell. *A Preview of Policy Sciences*. New York : American Elsevier Publishing Co. 1968.

<sup>8</sup> William N. Dunn. *Op.cit.*

<sup>9</sup> William N. Dunn. *Op.cit.*

mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik sosial sekarang.

Terdapat 3 bentuk utama analisis kebijakan yaitu retrospektif prospektif, dan terintegrasi. Perbedaan diantara bentuk-bentuk utama tersebut membantu dalam memahami isu-isu yang tak terpecahkan dari analisis kebijakan.

### **2.1.2 Analisis Kebijakan Retrospektif**

Analisis ini merupakan bagian dari analisis kebijakan publik. Hanya saja yang membedakan retrospektif yaitu melakukan analisis setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membantu pembuat kebijakan memecahkan masalah-masalah publik. Selain itu, dalam analisis ini terdapat informasi mengenai masalah-masalah yang terdapat pada publik yang ditujukan pada pembuat kebijakan.

Analisis retrospektif merupakan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan<sup>10</sup>. Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang titik pentingnya berada pada akibat-akibat atau dampak-

---

<sup>10</sup> Mohammad Ahyan Yusuf Sya'bani. Penerapan Kebijakan Dalam Pendidikan Islam (Studi Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan) TAMADDUN : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan. 2019. 20.1 : Hal. 34.

dampak dari suatu kebijakan setelah kebijakan tersebut ditetapkan dan diimplementasikan.

William N. Dunn membagi 3 tipe kelompok analisis yang berorientasi pada masalah ;

1. Analisis yang berorientasi pada disiplin.

Analisis ini mengembangkan dan menguji teori serta menerangkan sebab akibat suatu kebijakan.

2. Analisis yang berorientasi pada masalah.

Analisis ini juga menerangkan sebab akibat dari suatu kebijakan. Akan tetapi, analisis ini kurang menaruh pengujian terhadap teori-teori yang mana ini menjadi bagian penting.

3. Analisis yang berorientasi pada aplikasi.

Analisis ini menerangkan sebab akibat dari suatu kebijakan dan program publik tetapi tidak melakukan pengembangan dan pengujian teori.

Dari ketiga tipe kelompok analisis tersebut, masing-masing kelompok analisis tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kebijakan retrospektif lebih terfokus pada pengembangan informasi setelah kebijakan tersebut dilakukan. Menurut Carl, Sawicki, dan Clark (2012) :

*“Analisis retrospektif mengacu pada deskripsi dan interpretasi atas kebijakan yang terjadi. Analisis ini memiliki peran yang penting dalam*

*memprioritaskan serta melegitimasi kebijakan saat ini maupun dimasa depan”*

Dari pendapat ahli diatas mengenai analisis kebijakan retrospektif dapat diketahui analisis retrospektif penting dilakukan dalam sebuah penelitian karena dapat menyelidiki sejauh mana kebijakan atau peraturan tersebut memiliki dampak yang diinginkan. Keutamaan kebijakan retrospektif yaitu dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan dalam menjalankan suatu kebijakan. Analisis kebijakan retrospektif juga dapat digunakan sebagai pembandingan kebijakan yang berlaku saat ini dengan yang berlaku dimasa depan, sehingga nantinya berdampak pada peningkatan kualitas kebijakan.

Analisis retrospektif sangat efektif untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pelaksanaan kebijakan dengan didukung hasil yang informatif. Hal ini berlaku pada suatu organisasi terutama dalam instansi pemerintahan.

Analisa ini biasanya disebut sebagai analisa evaluatif. Hal ini berarti pula menilai ulang konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari pelaksanaan kebijakan. Analisis kebijakan ini meninjau apa yang terjadi dan perbedaan apa yang dibuat.

### **2.1.3 Evaluasi Kebijakan (William N. Dunn)**

Evaluasi merupakan salah satu mekanisme pengawasan kebijakan. Parameter yang umum digunakan adalah kesesuaian, relevansi,

kecukupan, efisiensi, keefektifan, keadilan, respon dan dampak. Kesesuaian evaluasi harusnya dikembangkan untuk mencakup tidak hanya proses, tetapi juga dampak jangka panjang dan jangka pendek dari sebuah kebijakan.<sup>11</sup>

Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata pada masyarakat. Hal ini berarti bahwa evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang terjadi sebenarnya dari suatu kebijakan.<sup>12</sup> Sebagaimana pengertian evaluasi dampak kebijakan yang diungkapkan oleh William N. Dunn.

Evaluasi kebijakan memberikan perhatian yang lebih besar kepada output atau dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kaitannya dengan dampak kebijakan, perlu dipahami akan adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir implementasi kebijakan muncul

---

<sup>11</sup> Ayuningtyas, Dumilah. Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2014.

<sup>12</sup> Winarno, B. Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS. 2004



pula dampak-dampak yang tak terduga yang diantaranya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tidak diinginkan.<sup>13</sup>

Kegiatan evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini, selain dapat memberikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi “pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya.

Fungsi paling mendasar dari kegiatan evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Fungsi kedua, evaluasi memberi kontribusi untuk upaya klarifikasi dan kritik atas nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Fungsi yang lain, evaluasi menunjang pelaksanaan prosedur-prosedur lainnya dalam analisis kebijakan, seperti perumusan masalah, rekomendasi, dan kegiatan lainnya. Evaluasi kebijakan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, akan tetapi ia terkait dengan kegiatan analisis kebijakan yang lain.<sup>14</sup>

William N. Dunn mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan mempunyai dua aspek yang paling berhubungan, yaitu penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program serta aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil. Dunn selanjutnya membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga berdasarkan

---

<sup>13</sup> Wibawa, S. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Raja Grafindo. 1994.

<sup>14</sup> Intan Fitri Meutia, Ph.D. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta : CV. Anugrah Utama Raharja. 2013.

waktu evaluasi, yaitu “sebelum dilaksanakan”, “pada waktu dilaksanakan” dan “sesudah dilaksanakan”. Evaluasi pada waktu pelaksanaan umumnya disebut pula sebagai evaluasi proses, sementara evaluasi setelah kebijakan diimplementasikan, disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan atau evaluasi dampak pengaruh (*outcome*) kebijakan.<sup>15</sup>

Adapun tujuan evaluasi adalah untuk melihat apakah kebijakan telah sukses mencapai tujuannya dan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

## **2.2 Konsep Tentang Pembangunan**

Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya..<sup>16</sup>

Pembangunan disini merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan juga merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat serta tertuju pada cita-cita keadilan sosial.

Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh

---

<sup>15</sup> William N. Dunn. *Op.cit.*

<sup>16</sup> Kumba Digidowiseiso. *Teori Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS). 2019.

birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan.<sup>17</sup>

Untuk itu, pembangunan butuh proses dan tahapan terukur. Tahapan itu harus dapat menyentuh berbagai bidang, yakni *pertama* ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil. *Kedua* adalah tahap kesejahteraan sosial. *Ketiga* adalah tahap keadilan sosial. Jadi makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), dan pertumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan..<sup>18</sup>

### **2.3 Kerangka Pikir**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dengan adanya kebijakan yang disusun dalam suatu perencanaan yaitu pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi. Jaringan jalur kereta api ini dibangun agar masyarakat dapat menjangkau daerah-daerah penting di Pulau Sulawesi.

---

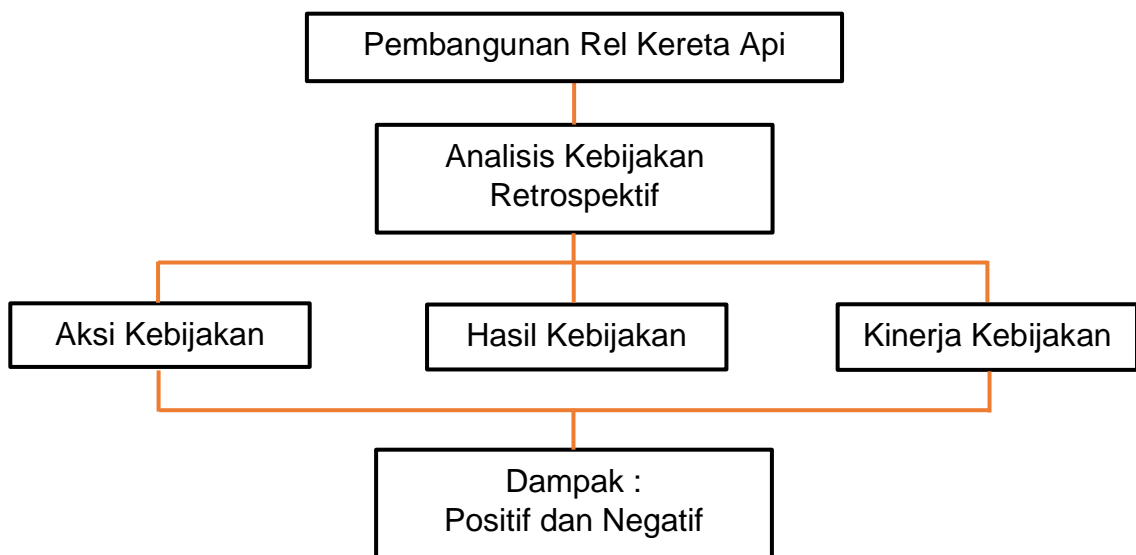
<sup>17</sup> Drajat Tri Kartonto dan Hanif Nurcholis. Konsep dan Teori Pembangunan. Hal.15.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Jalur kereta api ini dibangun mulai pada tahun 2019 yang dimulai dari tahap I, yaitu jalur kereta api dari Makassar-Maros-Pangkep-Barru-Parepare.

Pembahasan yang akan diteliti adalah menganalisis secara retrospektif kebijakan terkait pembangunan rel kereta api yang kemudian nantinya akan dianalisis apa saja dampak kebijakan dan membedakan yang mana yang merupakan dampak positif dan negatif dari pembangunan rel kereta api tersebut.

#### 2.4 Skema Pemikiran



Gambar 2.1 Skema

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti serta menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian. Sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan.

1. Jurnal yang ditulis oleh Dhea Candra Dewi dengan Judul “Kajian Retrospektif Kebijakan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal”. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pariwisata halal yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi konsep syariah. Dengan kajian yang memfokuskan pada penelitian setelah aksi kebijakan atau setelah diimplementasikan kebijakan. Hasil penelitian jurnal ini disimpulkan bahwa proses sosialisasi dan adaptasi terhadap pelaksanaan konsep wisata halal yang berintegrasi dengan nilai-nilai syariah masih menjadi tugas utama lembaga penyelenggaraan pariwisata halal. Arti dan tujuan utama dari pariwisata halal masih belum dimaknai secara mendalam oleh masyarakat secara umum.

Adapun persamaannya penelitian diatas dengan penelitian penulis ialah pembahasan yang membahas analisis kebijakan yang

memfokuskan pada penelitian setelah aksi kebijakan atau setelah diimplementasikan kebijakan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Rossa Kristiana dengan judul “Analisis Retrospektif Kebijakan Relokasi Pasar Pahing di Kota Blitar”. Pemindahan pasar merupakan salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah Kota Blitar dalam mengembangkan pasar rakyat di Kota Blitar. Jurnal ini menggunakan analisis retrospektif dalam meneliti relokasi Pasar Pahing dengan referensi teori William N. Dunn. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran analisis retrospektif kebijakan relokasi Pasar Pahing. Informasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi pengambil kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kualitas kebijakan yang telah dibuat.

Adapun persamaannya penelitian diatas dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti menggunakan teori Analisis Kebijakan Retrospektif William N. Dunn tetapi berbeda dengan fokus masalah kebijakan yang dibahas penulis.

3. Jurnal yang ditulis oleh Herliyana Novita Widiyaningrum dengan judul “Analisis Retrospektif Dampak Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Metro Provinsi Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang analisis retrospektif dampak yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan Penerapan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Metro Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pembuat kebijakan dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat bagi para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini menggunakan teori analisis retrospektif yang dikemukakan oleh William N. Dunn dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.

4. Jurnal yang ditulis oleh Debby D. V. Kawengian dan Joyce Jacinta Rares dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal ini meneliti bagaimana evaluasi kebijakan tentang kegagalan dari implementasi kebijakan pencegahan dan perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak di Sulawesi Utara. Jurnal ini menggunakan pendekatan evaluasi formal dengan bentuk evaluasi proses serta menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan. Tipe evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada tipe evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Jones (1984:359) yaitu bahwa evaluasi kebijakan meliputi *political evaluation*, *organizational evaluation*, dan *substantive evaluation*.

Adapun persamaannya penelitian diatas dengan penelitian penulis ialah pembahasan yang membahas evaluasi kebijakan tetapi berbeda dengan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Bontoa yang mengkaji tentang evaluasi kebijakan pembangunan infrastuktur.

5. Jurnal yang ditulis oleh Laurencia. G. Ajawaila, dkk. Dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kab. Halmahera Utara” Jurnal ini meneliti tentang evaluasi kebijakan pembangunan infrastuktur. Penelitian ini memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik serta juga penelitian ini difokuskan pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena dampak kebijakan.

Adapun persamaannya penelitian diatas dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti evaluasi kebijakan dengan objek pembangunan infrastruktur tetapi berbeda pada lokasi dimana penulis melakukan penelitian di Kabupaten Maros Kecamatan Bontoa.

6. Skripsi yang ditulis oleh Nurfadillah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Filsafat dan Politik, dengan Judul “Dampak Pembangunan Rel Kereta Api Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat di Kelurahan Mangempang Kab. Barru”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana perubahan perilaku sosial



masyarakat terhadap pembangunan rel kereta api. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi untuk mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis terdapat pada tujuan penelitian dimana fokus penelitian diatas ialah menganalisis perubahan perilaku masyarakat menggunakan pendekatan psikologis.